

DPD Bahas di Aston

PENGELOLAAN keuangan negara di daerah akan dibahas dalam Focus Group Discussion di Hotel Aston Pontianak, Rabu (5/10) ini. FGD ini diselenggarakan oleh Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Dominikus Okbetus dari Sekretariat Panitia Akuntabilitas Publik DPD melalui rilisnya, Selasa (4/10), mengatakan, FGD diharapkan menjangkau masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah.

PAP sendiri merupakan satu di antara alat kelengkapan DPD yang membidangi masalah akuntabilitas, yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

■ **Bersambung ke Hal 7**

DPD Bahas di Aston

Sambungan Hal. 1

"Peran lainnya, melakukan diskusi serta mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penerapan anggaran negara dalam APBD, guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (good governance) yang efektif, akuntabel, dan transparan," kata Dominikus.

Berbagai masukan dan aspirasi yang diserap akan dijadikan sebagai penguat dan referensi bagi penyusunan strategi daerah, guna meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah.

"Melalui FGD diharapkan pemda bersama pihak terkait (stakeholder) mendapatkan pemahaman yang sama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan transparan," katanya.

Tujuan FGD sendiri, me-

nurut Dominikus, antara lain menyamakan persepsi dan pemahaman antara pejabat pemerintah daerah dengan BPK, KPK, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait peraturan perundang-undangan tentang tata kelola keuangan negara.

Lainnya, mendapat informasi terbaru dari pemerintah pusat tentang berbagai jenis pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara di daerah, serta peraturan perundang-undangan yang kerap dilanggar.

"Juga, untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Dominikus.

Melalui FGD itu pula, diharapkan pejabat pemda bisa memahami berbagai konsekuensi

hukum dan sosial ekonomi dari pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara di daerah.

FGD yang digelar mulai pukul 12.00 sampai 16.30 WIB tersebut diikuti gubernur, bupati/wali kota, sekretaris daerah, kepala biro keuangan, dan kepala Bappeda.

Narasumber dari FGD yang bertema *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara* itu adalah gubernur, bupati/wali kota, BPK, KPK, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.

Sebagai gambaran, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada saat rapat di DPD pada 17 Januari 2011, menjelaskan, terdapat 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17 orang di antaranya adalah gubernur. (*)